

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi lebih berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan menjadi motor penggerak kelangsungan hidup dalam konteks politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendidikan pada hakekatnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Pendidikan dapat membawa individu menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dapat pula dipandang sebagai kegiatan yang lebih formal dilakukan di sekolah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan sarana dalam wujudkan tujuan negara. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, serta gender.

Realitasnya masih ada sebagian orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan bagi anak. Menurut laporan tahun 2012 di Indonesia masih terdapat sekitar 2,3 juta anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah (Unicef, 2012:9). Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat terdapat sekitar 42% anak

yang putus sekolah. Putus sekolah menjadi masalah yang cukup serius karena ironis dengan usaha pemerintah yang gencar untuk memajukan pendidikan nasional. Putus sekolah merupakan jurang yang menghambat anak untuk mendapatkan haknya. Putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi, psikologis, serta lingkungan sosial menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Mayoritas anak-anak yang mengalami putus sekolah disebabkan karena faktor ekonomi, namun tidak sedikit pula putus sekolah yang disebabkan karena faktor psikologis dan lingkungan sosial.

Pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat dari Program Wajib Belajar. Pemerintah awalnya mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Enam Tahun pada 1984 hingga tahun 1993. Pada tahun 1994 pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun yang ditujukan pada penduduk usia pendidikan dasar hingga ke jenjang SMP. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan guna memperoleh pendidikan bagi semua kelompok usia pendidikan dasar (7-15 tahun). Peserta didik melalui program tersebut memungkinkan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran lebih lama di sekolah.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengalokasikan APBN sebanyak 20% untuk pendidikan. Wajib belajar yang mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, ternyata masih belum optimal. Keinginan pemerintah untuk membebaskan anak-anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah belum bisa

terwujud, walaupun sudah dicanangkan Program BOS. Kebijakan untuk menggratiskan biaya sekolah, rupanya belum bisa menjamin ketuntasan masalah putus sekolah bagi anak. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dan beberapa undang-undang yang mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi anak, masih belum optimal jika melihat realitas sebagian anak-anak terutama di pedesaan yang putus sekolah.

Tema penelitian ini selaras dengan Prodi PPKn FKIP UMS. Salah satu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM (Buku Pedoman Akademik 2013/2014:140). Penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah Hak Asasi Manusia pada pembahasan hak-hak anak terhadap pendidikan, sedangkan keterkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Indonesia yang membahas permasalahan sosial. Putus sekolah dan dampak negatifnya pada anak merupakan permasalahan sosial sehingga berkaitan dengan pelajaran Sosiologi di sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai faktor penyebab putus sekolah serta dampak negatifnya bagi anak di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Dipilihnya Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar sebagai tempat penelitian, mengingat di lokasi tersebut masih terdapat anak-anak yang mengalami putus sekolah. Anak-anak rela meninggalkan bangku sekolah guna membantu perekonomian keluarga dengan

berjualan buah *strawberry*, makanan ringan, atau pun membantu orangtua di kebun.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak putus sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimanakah dampak negatifnya bagi anak yang putus sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mendeskripsikan dampak negatifnya bagi anak yang putus sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai faktor-faktor penyebab putus sekolah dan dampak negatifnya bagi anak.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis:

- 1) Mengerti dan memahami tentang profil anak putus sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
- 2) Mengerti dan memahami tentang faktor-faktor penyebab putus sekolah serta dampak negatifnya bagi anak di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

b. Orang Tua:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para orang tua dari anak-anak putus sekolah untuk lebih mementingkan pendidikan anak.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi orang tua yang memiliki anak yang putus sekolah agar dapat memberi motivasi baik moril maupun materiil.

c. Bagi Anak:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya pendidikan bagi perkembangan diri, masa depan dan kemajuan bangsa.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anak untuk tetap bersekolah.

d. Bagi Pemerintah:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat menangani masalah putus sekolah sehingga dapat meningkatkan keberhasilan tujuan pendidikan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat untuk mengupayakan solusi agar putus sekolah dapat dicegah atau dikurangi.

E. Daftar Istilah

1. Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara (1945:145) sebagaimana dikutip oleh Laksono (2010:2), pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar bisa menjadi manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mengembangkan segala potensi diri yang menuntut segala kodrat pada diri anak agar dapat mencapai tujuan yang diperlukan.

2. Anak

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut UU No. 39 Tahun 2004 Tentang HAM Pasal 1 Angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan, dan belum menikah.

3. Putus Sekolah

Menurut Gunawan (2010), putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Fachrozi dkk. (2012), putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempatnya belajar. Anak putus sekolah yang dimaksud disini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal karena berbagai faktor. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa putus sekolah adalah proses berhentinya siswa dari suatu lembaga pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan atau program belajarnya ke jenjang berikutnya yang disebabkan oleh berbagai faktor.

4. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:261), dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.